

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDISTRIBUSIAN GAS LPG
3KG DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Yusriadi¹, Abdul Jabbar², Barisan³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: yusriadi2322@gmail.com

Email: jbr.nyonk1@umsrappang.ac.id; uchenklppmstisip@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze local government supervision in the distribution of 3kg lpg gas in Sidenreng Rappang Regency. This study used descriptive qualitative with 8 informants as data sources and data analysis using Nvivo 12 Software. The results of this study show that local government supervision in the distribution of 3kg LPG gas has been implemented quite well in supervising the steps in supervising inspection and monitoring prices, stock availability, and completeness of documents. two indicators of Sarwoto's theory of supervision (2003; 93) which has been run by the Head of the Economic and Natural Resources Section, and the Trade and Industry Office, as well as the 3kg LPG Gas Agent and Base has been carried out quite well.

Keywords: Supervision, distribution, Liquefied Petroleum Gas 3kg.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Pengawasan pemerintah daerah dalam pendistribusian gas lpg 3kg di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan 8 informan sebagai sumber data dan analisis data menggunakan Software Nvivo 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah dalam pendistribusian gas lpg 3kg telah di implementasikan dengan cukup baik dalam melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah dalam melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan dan pemantauan kepada harga, ketersediaan stok, serta kelengkapan dokumen. dua indikator teori pengawasan Sarwoto (2003;93) yang telah dijalankan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Dinas Perdagangan dan perindustrian, serta Agen dan Pangkalan Gas Lpg 3kg telah dijalankan cukup baik.

Kata kunci: Pengawasan, Pendistribusian, Liquefied Petroleum Gas 3kg.

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan perekonomian negara. Salah satu upaya dilakukan adalah melakukan berbagai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah konversi dari minyak tanah ke gas LPG. Gas LPG 3kg mempunyai peran dalam sektor energi di Indonesia. Produksi gas dapat dilakukan oleh Pt Pertamina (Persero) dan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kebijakan konversi terhadap minyak tanah ke gas LPG terdapat landasan kebijakan yang dapat mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga dengan pendapatan rendah serta mengurangi dampak polusi lingkungan. Program konversi menjadi semakin relevan dengan semakin langkanya pasokan minyak tanah bagi masyarakat menengah ke bawah, sehingga diharapkan dapat mengatasi kelangkaan minyak tanah dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. (Nikmah Kholilah Lubis, 2022)

Pemerintah Daerah, lembaga independen, dan badan usaha yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dalam mendistribusikan gas LPG 3 Kg, melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa konversi dari minyak tanah ke gas LPG dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (South Lingkan, Daud Markus Liando 2018). Dalam melakukan transformasi untuk mendapatkan kualitas dalam memperbaiki organisasi pemerintah daerah maka perlu melakukan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



pengawasan (*control*) terhadap seluruh tindakan dari proses transformasi. Melalui pengawasan pendistribusian dalam penyimpangan- penyimpangan yang terjadi sejak awal, jika terjadi kesalahan lebih awal yang dapat diketahui maka akan dapat dilakukan perbaikan dengan cepat agar permasalahan bisa diatasi.(Imeilia et al., 2019)

Pengawasan dengan menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dapat mengidentifikasi kesalahan dan ketidaksesuaian dengan rencana. Untuk memastikan bahwa tugas kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan melakukan tindakan korektif dan perbaikan dapat menghindari terjadinya masalah yang serupa untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pendistribusian.(Ramadhan et al., 2020). Pendistribusian gas LPG 3kg memastikan bahwa semua tahapan mulai dari produksi hingga pengiriman kepada konsumen dapat berjalan sesuai dengan standar, rencana, dan regulasi yang ditetapkan dalam pengawasan. Pengawasan mencakup kualitas gas, harga, keamanan, rantai distribusi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengadaan distribusi gas LPG 3kg.(Gunawan et al., 2020).

Distribusi gas LPG 3kg merupakan kegiatan yang vital dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga di berbagai wilayah. Namun, karena pentingnya gas LPG dalam kehidupan sehari-hari, terdapat kebutuhan untuk mengawasi serta memantau distribusi gas lpg 3kg agar sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi gas LPG 3kg dalam melakukan pemeriksaan dan pemantauan untuk memastikan bahwa harga jual gas LPG 3kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik harga yang tidak wajar yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk mendeteksi adanya praktik penyalahgunaan harga atau penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dan pemantauan terhadap ketersediaan gas LPG tabung 3kg di suatu wilayah seperti di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian penting dari pengawasan pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasokan gas LPG 3kg mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara teratur, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi masalah terkait dengan distribusi dan ketersediaan gas LPG 3kg, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan pasokan yang cukup dan stabil. Pemeriksaan dan pemantauan terhadap kelengkapan dokumen, seperti pencatatan manual oleh penyalur dan berkas dokumen resmi pangkalan gas LPG tabung 3kg menjadi fokus dalam pengawasan pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam distribusi gas LPG 3kg mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Dengan memeriksa dan memantau kelengkapan dokumen serta persyaratan yang dipenuhi, pemerintah dapat memastikan bahwa distribusi gas LPG 3kg dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.(Dewi et al., 2023)

Kelangkaan yang terjadi Kabupaten Sidenreng Rappang mengakibatkan masyarakat kekurangan gas lpg untuk kebutuhan rumah tangga mengenai pasokan gas lpg 3kg masih terbatas dan terus berlanjut. Kelangkaan gas LPG 3kg menyulitkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga beberapa masyarakat kembali menggunakan kayu sebagai alternatif. Kondisi kelangkaan gas LPG 3kg berdampak pada para pangkalan yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh stok gas karena pasokan yang tidak mencukupi. PT Pertamina (Persero) sebagai produsen gas LPG 3kg telah berusaha untuk menyediakan pasokan yang mencukupi untuk masyarakat. Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi masalah kelangkaan gas LPG 3kg. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah petani yang beralih menggunakan gas LPG 3kg untuk mengoperasikan pompa air terus meningkat dan para petani mengandalkan gas LPG 3kg sebagai sumber tenaga untuk mengoperasikan pompa air yang digunakan dalam irigasi sawah. Perlu adanya solusi yang komprehensif untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3kg, termasuk upaya peningkatan pasokan, distribusi yang lebih efisien, dan pengawasan yang lebih ketat. Maka dari itu dapat melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa program peralihan penggunaan gas LPG berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.(Nikmah Kholilah Lubis, 2022)

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan fokus pengawasan pemerintah daerah dalam pendistribusian gas lpg 3kg. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan *Software Nvivo 12*.

PEMBAHASAN

Pengawasan pemerintah daerah dalam pendistribusian gas LPG 3kg meliputi beberapa langkah-langkah terhadap pemeriksaan harga, ketersediaan stok, serta kelengkapan dokumen dengan memberikan gambaran positif bahwa pengawasan dalam distribusi gas LPG 3kg dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah terhadap penetapan harga, ketersediaan stok, dan kelengkapan dokumen terhadap pemantauan dan pemeriksaan yang efektif. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk meminimalkan potensi risiko yang dapat timbul dalam distribusi gas LPG 3kg, seperti penyalahgunaan harga, kelangkaan pasokan, atau pelanggaran terhadap aturan perdagangan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat akan pasokan gas LPG 3kg dapat terpenuhi secara efisien dan aman, sementara kepercayaan terhadap sistem distribusi dapat dipertahankan. Pengawasan dalam pendistribusian gas LPG 3kg melalui pemeriksaan dan pemantauan telah menghasilkan hasil yang cukup baik dalam penetapan harga, ketersediaan stok, dan kelengkapan dokumen yang ditetapkan dalam distribusi gas lpg 3kg. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, namun hasil tersebut memberikan indikasi positif terkait dengan efektivitas pengawasan dalam menjaga integritas distribusi gas LPG 3kg.

Hasil analisis data yang digunakan dua indikator teori pengawasan Sarwoto (2003;93) yang telah dijalankan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Dinas Perdagangan dan perindustrian, serta Agen dan Pangkalan Gas Lpg 3kg. Pengawasan pemerintah daerah dalam pendistribusian gas LPG 3kg meliputi langkah-langkah terhadap pemeriksaan harga, ketersediaan stok, serta kelengkapan dokumen memberikan gambaran positif bahwa pengawasan dalam distribusi gas LPG 3kg telah dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah pemantauan dan pemeriksaan yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan dalam pendistribusian gas LPG 3kg melalui pemeriksaan dan pemantauan telah menghasilkan hasil yang cukup memuaskan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar, regulasi, dan prosedur yang ditetapkan dalam distribusi gas lpg 3kg.

Dalam penelitian ini, peneliti mendikripsikan dan menganalisis pengawasan pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan pengawasan menurut Sarwoto (2003;93) yang menjelaskan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikehendaki. Dalam konteks pengawasan pemerintah terkait pendistribusian gas LPG 3kg, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendistribusian gas LPG 3kg berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal keamanan, kualitas, dan ketersediaan produk yang melibatkan pemeriksaan dan pemantauan terhadap proses distribusi, mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen akhir, untuk memastikan bahwa gas LPG didistribusikan dengan tepat dan aman bagi masyarakat. Adapun indikator pengawasan tersebut :

1. Pemeriksaan

Menurut Sarwoto (2003) Pemeriksaan dalam pengawasan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran disamping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan atas hasil yang telah dilakukan. Hasil analisis dalam bentuk visualisasi diagram terkait pemeriksaan pada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menunjukkan hasil persentase dengan jumlah 45,45%, pada dinas perdagangan dan perindustrian menunjukkan hasil 45%, pada Pt. Sinar energi sulawesi menunjukkan hasil 48%, pada agen gas lpg 3kg menunjukkan hasil 46,15%, dan pangkalan gas lpg 3kg menunjukkan hasil persentase 47,37%.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan terhadap bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdapat dua entitas yang menonjol dengan hasil persentase yang tinggi. Pertama, pemeriksaan pada PT. Sinar Energi Sulawesi mencapai 48%, dan kedua, pemeriksaan pada pangkalan gas LPG 3kg dengan hasil persentase 47,37%. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan kepada PT. Sinar Energi Sulawesi dan pangkalan gas LPG 3kg menunjukkan tingkat kepatuhan atau kualitas yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan proses pemeriksaan dengan efektif, yang menghasilkan hasil yang baik dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku dalam sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam, khususnya terkait dengan distribusi gas LPG. Dengan demikian, langkah-langkah pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap entitas seperti PT. Sinar Energi Sulawesi dan pangkalan gas LPG 3kg menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kualitas layanan.

2. Pemantauan

Menurut Sarwoto (2003) Pemantauan dalam pengawasan Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (direct) maupun dilakukan secara tidak langsung (indirect). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang di rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.

Hasil analisis dalam bentuk visualisasi diagram terkait pemantauan pada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menunjukkan hasil persentase dengan jumlah 54,55%, pada dinas perdagangan dan perindustrian menunjukkan hasil 55%, pada Pt. Sinar energi sulawesi menunjukkan hasil 52%, pada agen gas lpg 3kg menunjukkan hasil 53,85%, dan pangkalan gas lpg 3kg menunjukkan hasil persentase 52,63. Hasil analisis visualisasi diagram dengan persentase 55% terkait dengan pemantauan pada dinas perdagangan dan perindustrian menunjukkan bahwa pengawasan dalam pendistribusian gas LPG 3kg berjalan dengan keberhasilan yang tinggi. Ini menggambarkan bahwa pemerintah atau otoritas terkait telah berhasil menjalankan tugas pengawasan mereka dengan efektif dan efisien. Dalam pendistribusian gas LPG 3kg, persentase tersebut menandakan bahwa berbagai aspek distribusi, seperti ketersediaan stok, penetapan harga, keselamatan, dan kepatuhan terhadap regulasi, dikelola dengan baik. Stok gas LPG 3kg dipantau untuk memastikan pasokan yang memadai untuk kebutuhan masyarakat, sementara harga yang ditetapkan dipantau untuk mencegah praktik penimbunan atau penyalahgunaan harga.

Dari hasil wawancara beberapa informan dengan indikator adaptif pemerintah daerah dapat dilihat melalui project map menggunakan N vivo 12. Pada gambar Project Map Pengawasan dalam pendistribusian gas LPG 3kg di kabupaten sidenreng rappang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Perbup Nomor Nomor 55/1/2023 menjadi landasan hukum yang penting. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi gas LPG 3kg dilakukan dengan sesuai regulasi dan standar yang telah ditetapkan, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Analisis data yang menunjukkan bahwa semua sumber data terkait pendistribusian gas LPG 3kg di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merealisasikan teori Sarwoto menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam teori tersebut.

Analisis data mencakup pengukuran kinerja berbagai entitas terkait, seperti agen, pangkalan, dan stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE), dalam hal kepatuhan terhadap peraturan dan kinerja operasional mereka agar membantu pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dan mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. Jika ditemukan penyimpangan atau pelanggaran maka pemerintah daerah dapat mengambil tindakan korektif dengan ketentuan berlaku dan memberikan sanksi atau melakukan inspeksi lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi

yang berlaku. Hal ini mencerminkan konsep pengawasan yang tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga bertindak untuk memperbaikinya. (Dr. Rahmawati Sururama, 2023)

KESIMPULAN

Pengawasan pemerintah daerah dalam pendistribusian gas LPG 3kg meliputi beberapa langkah-langkah terhadap pemeriksaan harga, ketersediaan stok, serta kelengkapan dokumen memberikan gambaran positif bahwa pengawasan dalam distribusi gas LPG 3kg telah dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah pemantauan dan pemeriksaan yang efektif. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk meminimalkan potensi risiko yang dapat timbul dalam distribusi gas LPG 3kg, seperti penyalahgunaan harga, kelangkaan pasokan, atau pelanggaran terhadap aturan perdagangan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat akan pasokan gas LPG 3kg dapat terpenuhi secara efisien dan aman, sementara kepercayaan terhadap sistem distribusi dapat dipertahankan.

Pengawasan dalam pendistribusian gas LPG 3kg melalui pemeriksaan dan pemantauan telah menghasilkan hasil yang cukup memuaskan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar, regulasi, dan prosedur yang ditetapkan dalam distribusi gas lpg 3kg. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, namun hasil tersebut memberikan indikasi positif terkait dengan efektivitas pengawasan dalam menjaga integritas distribusi gas LPG 3kg. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang memperlihatkan dua indikator teori pengawasan Sarwoto (2003;93) yang dijalankan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Dinas Perdagangan dan perindustrian, serta Agen dan Pangkalan Gas Lpg 3kg.

REFERENSI

- Dewi, S. R., Nurlaily, & Triana Dewi Seroja. (2023). Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 67–78. <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8599>
- Dr. Rahmawati Sururama. (2023). pengawasan pemerintahan. *Cendikia Mulia Mandiri*, 13(1), 104–116.
- Gunawan, W., Arifin, J., & Noor, Y. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas Lpg Tabung 3 Kg Di Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 3(2), 707–721. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/309>
- Imeilia, F., Widodo, S., & Mardianto, M. (2019). *Pengawasan Distribusi LPG 3 KG Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang Hari Tahun 2017*.
- Nikmah Kholilah Lubis, S. (2022). Pengawasan Pendistribusian Penggunaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Pendistribusian Dan Perdagangan Kota Tanjung Balai. *Jurnal Managemen Akuntansi (Jumsi)*, 2(8.5.2017), 17.
- Ramadhan, T., Liesmana, R., & Putera, R. E. (2020). Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2482>